

CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH DAN EKSPRESI KREATIF ILMU PENDIDIKAN

Analisis Kesulitan Belajar Siswa Menurut Polya pada Materi Turunan

Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengemas Produk dan Motivasi Belajar dengan Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Siswa Kelas XII Bisnis Daring dan Pemasaran SMK PGRI 4 Blitar Tahun Pelajaran 2019/2020

The Effectiveness of Mind Mapping Method with Facebook Media in Teaching Writing for Senior High School Students

Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Multiple Correlation of Browsing Internet and Watching English Movie toward Speaking Mastery of Junior High School Students

Evaluasi Penyelenggaraan Perkuliahan Daring Mata Kuliah Media Pembelajaran Matematika I Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Kampus Blitar

Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia

An Analysis on Intrinsic Aspects and Moral Values in the Novel of "Little Women" by Louisa May Alcott

Analisis Pembelajaran Daring melalui Grup *WhatsApp* pada Mata Kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang

An Analysis of Intrinsic Aspect and Moral Lesson in "Moby Dick" Novel by Herman Melville

Pemahaman Konsep Siswa terhadap Materi Aritmetika Sosial

Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum

An Analysis of Figurative Language in the Lyrics of Bruno Mars Album "Doo-Wops & Hooligans"

The Effectiveness of Reading Guide Using Wattpad in Teaching Reading for Junior High School

Digital Storytelling Affect in Multimedia Feature Writing Skill at Paragraph Writing

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
Terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting

Feri Huda

Wakil Ketua Penyunting

Saiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana

Udin Erawanto

Suryanti

Annisa Rahmasari

Penyunting Ahli

Miranu Triantoro

Riki Suliana

Khafid Irsyadi

Pelaksana Tata Usaha

Kristiani

Suminto

Sunardi

Alamat Penerbit/Redaksi : Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar: Jl. Kalimantan No. 111 Blitar, Telp. (0342) 801493. Langganan 2 Nomor setahun Rp. 200.000,00 ditambah ongkos kirim Rp. 50.000,00.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar. **Direktur Operasional** : Dra. Riki Suliana RS., M.Pd.

Penyunting menerima artikel yang belum pernah diterbitkan di media cetak yang lainnya. Syarat-syarat, format dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang dalam jurnal ini. Artikel yang masuk akan ditelaah oleh Tim Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Tim akan melakukan perubahan tata letak dan tata bahasa yang diperlukan tanpa mengubah maksud dan isinya.

Petunjuk Penulisan Cakrawala Pendidikan

1. Artikel belum pernah diterbitkan di media cetak yang lainnya.
2. Artikel diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang baik dan benar sesuai *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987)*
3. Pengetikan Artikel dalam format Microsoft Word, ukuran kertas A4, spasi 1.5, jenis huruf *Times New Roman*; ukuran huruf 12. Dengan jumlah halaman; 10 – 20 halaman.
4. Artikel yang dimuat dalam Jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, dan tinjauan buku baru.
5. Artikel ditulis dalam bentuk esai, disertai judul sub bab (heading) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul sub bab. Peringkat judul sub bab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, letaknya rata tepi kiri halaman, dan tidak menggunakan nomor angka, sebagai berikut:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar-kecil Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (*Huruf Besar-kecil Tebal, Miring, Rata Tepi Kiri*)

6. Artikel konseptual meliputi; (a) judul, (b) nama penulis, (c) abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris (maksimal 200 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (g) isi/pembahasan (terbagi atas sub-sub judul), (h) penutup, dan (i) daftar rujukan. Artikel hasil penelitian disajikan dengan sistematika: (a) judul, (b) nama-nama peneliti, (c) abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris (maksimal 200 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan penelitian, (g) metode, (h) hasil, (i) pembahasan (j) kesimpulan dan saran, dan (k) daftar rujukan.
7. Daftar rujukan disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Anderson, D.W., Vault, V.D., dan Dickson, C.E. 1993. *Problem and Prospects for the Decades*

Ahead: Competency Based Teacher Education. Barkeley: McCutchan Publishing Co.

Huda, N. 1991. *Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal*. Makalah disajikan dalam Loka

Karya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP MALANG, Malang, 12 Juli.

Prawoto, 1998. *Pengaruh Pengirformasian Tujuan Pembelajaran dalam Modul terhadap Hasil*

Belajar Siswa SD PAMONG Kelas Jauh. Tesis tidak diterbitkan. Malang: FPS IKIP MALANG.

Russel, T. 1993. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam P.J. Nlack & A. Lucas (Eds.) *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London:Routledge.

Sihombing, U. 2003. *Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat*.
<http://www.puskur.or.id>.Diakses pada 21 April 2006.

Zainuddin, M.H. 1999. Meningkatkan Mutu Profesi Keguruan Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*. 1 (1):45-52.

8. Pengiriman Artikel via email ke hudaferi@gmail.com paling lambat 3 bulan sebelum bulan penerbitan.

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Volume 24, Nomor 2, Oktober 2020

Daftar Isi

Analisis Kesulitan Belajar Siswa Menurut Polya pada Materi Turunan.....	1
<i>Cicik Pramesti, Youngky Putra Ramadhana</i>	
Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengemas Produk dan Motivasi Belajar dengan Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Siswa Kelas XII Bisnis Daring dan Pemasaran SMK PGRI 4 Blitar Tahun Pelajaran 2019/2020	12
<i>Ekbal Santoso</i>	
The Effectiveness of Mind Mapping Method with Facebook Media in Teaching Writing for Senior High School Students	25
<i>Feri Huda</i>	
Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	42
<i>Kadeni</i>	
Multiple Correlation of Browsing Internet and Watching English Movie toward Speaking Mastery of Junior High School Students.....	60
<i>M. Ali Mulhuda</i>	
Evaluasi Penyelenggaraan Perkuliahan Daring Mata Kuliah Media Pembelajaran Matematika I Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Kampus Blitar	68
<i>Mohamad Khafid Irsyadi</i>	
Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia	79
<i>Miranu Triantoro</i>	
An Analysis on Intrinsic Aspects and Moral Values in the Novel of “Little Women” by Louisa May Alcott.....	88
<i>Ratna Nurlia</i>	
Analisis Pembelajaran Daring melalui Grup <i>WhatsApp</i> pada Mata Kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang	101
<i>Riki Suliana</i>	

An Analysis of Intrinsic Aspect and Moral Lesson in “Moby Dick” Novel by Herman Melville	121
<i>Saiful Rifa'i</i>	
Pemahaman Konsep Siswa terhadap Materi Aritmetika Sosial.....	149
<i>Suryanti, Desy Nikmatul Nur Azizah</i>	
Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum	150
<i>Udin Erawanto</i>	
An Analysis of Figurative Language in the Lyrics of Bruno Mars Album “Doo-Wops & Hooligans	171
<i>Varia Virdania Virdaus</i>	
The Effectiveness of Reading Guide Using Wattpad in Teaching Reading for Junior High School	190
<i>Wiratno</i>	
Digital Storytelling Affect in Multimedia Feature Writing Skill at Paragraph Writing	201
<i>Yulia Nugrahini</i>	

PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM

Udin Erawanto

erawantoudin@gmail.com

Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar

Abstrak: Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat datang ketempat pemungutan suara memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum menentukan kearah mana bangsa ini dibawa dengan jalan ikut terlibat mensukseskan mekanisme kepemimpinan yang diselenggarakan dengan biaya tidak sedikit. Tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap sistem politik. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka tingkat kepercayaan yang diberikan pada pemerintah juga semakin tinggi, sehingga memperkuat keberadaan sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Dengan demikian sikap dan perilaku golongan putih dalam pemilihan umum perlu diminimalisir supaya kredibilitas pemerintahan dan kualitas demokrasi tetap terjaga. Golongan putih bukanlah pilihan terbaik, justru sebaliknya sebagai wujud terkisisnya rasa nasionalisme warga negara. Salah satu upaya meminimalisir golongan putih adalah mengoptimalkan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik warga negara untuk membangun kehidupan demokrasi yang berkualitas. Hal ini bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan oleh partai politik.

Kata Kunci: penguatan, partisipasi politik, pemilihan umum

Abstract: Public political participation in general elections is reflected in the attitudes and behavior of people coming to the polling places to cast their votes in general elections. Community involvement in the general election determines which direction this nation is taken by being involved in the success of the leadership mechanism which is organized at no small cost. The high level of community political participation shows the amount of public support for the political system. The higher the community participation, the level of trust given to the government is better, thus strengthening the existence of the ongoing government system. That is why the attitudes and behavior of the abstain group in general elections need to be minimized so that the credibility of the government and the quality of democracy is maintained. Abstain group is not the best choice, on the contrary as a manifestation of the creation of a sense of citizen nationalism. One of the efforts to minimize abstain group is to optimize the function of political parties as a means of political education for citizens to build a quality democratic life. This can be done through formal and non-formal educational institutions which are carried out programmatically and continuously by political parties.

Key Words: strengthening, political participation, general election

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat modern, keterlibatan masyarakat dalam masalah politik dan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan dan bagian dari kehidupannya. Masyarakat semakin sadar bila dirinya tidak hanya sebagai penonton yang menggantungkan pada pemerintah untuk mengatur dan mengurus kebutuhannya. Aspirasi rakyat perlu didengar dan diperhatikan, rakyat harus terlibat dan dilibatkan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Di negara demokrasi kran kemerdekaan dan kebebasan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya perlu ditumbuhkembangkan dan jaminan kepastian dan perlindungan hukum perlu direalisasikan sehingga masyarakat tidak takut dan tertekan dalam menyalurkan aspirasinya. Zuhro,Dkk (2009:89) mengemukakan, esensi demokrasi adalah terbukannya peluang partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik (public policy). Sistem politik yang demokratis menyediakan ruang publik yang memadai bagi masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya kepada para pembuat kebijakan (decision maker). Selain itu, dalam sistem yang demokratis, kesadaran politik masyarakat cukup tinggi untuk berpartisipasi secara otonom dalam prospek politik sehingga terbangun konfigurasi demokrasi yang cukup eksotik. Harun dan Sumarno

(2006:134) mengemukakan, hakikat partisipasi politik adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga memberi kesempatan berpartisipasi mengandung makna bahwa hak-hak asasi warga negara sangat dihargai.

Partisipasi politik masyarakat yang tinggi mencerminkan kualitas demokrasi dari suatu pemerintahan yang ada. Hal ini mengandung makna, pertama semakin tinggi kesadaran masyarakat terlibat dalam masalah politik terutama dalam menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan umum menandakan tingginya kepercayaan dan legimasi pemerintahan yang diberikan kepada rakyat. Keberadaan pemerintahan semakin kuat karena mendapat dukungan secara langsung dari rakyat. Hal ini sesuai dengan makna demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedua, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan dan politik menunjukkan rakyat semakin sadar dan ikut bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi. Pendapat senada dikemukakan Subiacto dan Ida (2012: 64) Partisipasi politik yang ada di suatu negara akan menentukan kualitas demokrasi negara atau pemerintahan yang ada. Demokrasi tidak akan berfungsi tanpa aktivitas atau tindakan minimum yang dilakukan warga negara dalam berpartisipasi politik.

Di negara demokrasi pemilihan umum merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pemilihan

umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, menentukan pilihannya. Masyarakat diminta memiliki kesadaran terlibat secara aktif menegakkan dan menjaga sistem politik yang demokratis dengan cara menyalurkan aspirasinya, yakni datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih secara langsung wakil-wakil rakyat yang dipandang bisa menyalurkan aspirasinya. Myron (dalam Suko Susilo, Basrowi, Sukidi, 2003:83) menerangkan terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi penyebab masyarakat berkenan berpartisipasi dalam politik seperti (1) akibat adanya modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik (2) adanya perubahan-perubahan struktur kelas (3) adanya pengaruh intelektual dan komunikasi massa modern (4) adanya konflik antar kelompok kepentingan politik (5) adanya keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, kebudayaan.

Namun dalam realitasnya tidaklah demikian, sekarang ini justru banyak mengundang pertanyaan tentang keterlibatan masyarakat dalam mensukseskan pesta demokrasi yang dinamakan pemilu. Fenomena golongan putih terus menjadi perbincangan bahkan justru dipandang sebagai ancaman keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Hal ini cukup wajar mengingat pemilu merupakan sarana

untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat. Dengan mendapatkan legitimasi yang besar dari rakyat, merupakan indikator bila sistem politik telah mendapat dukungan dari rakyat. Dilihat dari faktor biaya, pemilu merupakan salah satu bentuk kegiatan yang tidak sedikit menghabiskan anggaran negara. Dengan demikian bila pemilu tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka kerugian finansial cukup besar harus ditanggung negara dan akan mengganggu keberadaan sistem politik demokrasi yang selama ini telah dibangun.

Maka cukup beralasan, setiap menjelang pelaksanaan pemilu penyelenggara pemilu memiliki agenda menekan seminimal mungkin munculnya golongan putih di masyarakat. Kegiatan sosialisasi menjelang pelaksanaan pemilu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan penyelenggara pemilu sebagai langkah meminimalisir terjadinya golongan putih di masyarakat. Kegiatan sosialisasi merupakan proses memberikan pengetahuan dan membuka wawasan pada masyarakat khususnya calon pemilih supaya memiliki kesadaran mensukseskan pemilu dengan memberikan respon positif yakni datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan aspirasinya dengan memilih calon yang dianggap mampu menyalurkan aspirasinya dalam lima tahun mendatang.

Kesadaran yang cukup tinggi dalam menyalurkan aspirasi pada saat pelaksanaan pemilihan umum perlu dibangun dan hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kegiatan tersebut juga perlu didukung dengan perilaku pemerintah dan elit politik yang duduk di legeslatif harus bisa dijadikan suri tauladan masyarakat. Hal ini perlu dimengerti karena fakta dilapangan menunjukkan salah satu pemicu semakin rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemilihan umum karena perilaku pemerintah dan elit politik setelah terpilih dan dilantik tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan berambisi memuaskan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya sendiri. Keadaan ini semakin menjadikan masyarakat mengerti bila dirinya sebagai objek elit politik , hanya dibutuhkan kalau diperlukan dan setelah itu dilupakan atau dalam pribahasa dikenal dengan istilah habis manis sepah dibuang.

Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Pendidikan Politik

Keberadaan partai politik di negara demokrasi memiliki posisi yang cukup strategis. Partai politik selain sebagai wadah bagi anggotanya yang memiliki tujuan dan orientasi yang sama untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, juga sebagai sarana bagi warga masyarakat menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih dan duduk didalam lembaga pemerintahan.

Untuk itu partai politik melalui kader-kadernya yang telah dipilih dan dipercaya masyarakat duduk didalam lembaga legislatif dan pemerintahan harus mampu mengemban amanah yang diberikan pemilihnya.

Kader-kader partai politik yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum bertanggungjawab merealisasikan janji yang diucapkan selama berlangsung kampanye menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini dirasa cukup penting untuk tetap menjaga tingkat kepercayaan masyarakat sehingga tidak memicu lahirnya sikap apatis yang tercermin dalam bentuk perilaku ketidakmauan masyarakat menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan umum.

Di negara demokrasi, partai politik selain memiliki tujuan menempatkan kader-kadernya duduk dalam lembaga pemerintahan dan melakukan kontrol terhadap jalanya pemerintahan, juga memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi warga negara. Pendidikan politik merupakan media yang digunakan partai politik menanamkan nilai-nilai politik bagi warga masyarakat dengan tujuan mendewasakan warga masyarakat supaya memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dibidang politik. Tingginya kesadaran masyarakat dibidang politik sangat diperlukan di negara demokrasi terutama dinegara yang sedang berkembang dimana tingkat pendidikan masyarakatnya masih

rendah dan kondisi ekonominya masih dalam kelompok menengah kebawah. Untuk itu supaya perkembangan demokrasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sangat diperlukan dukungan dan partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan politik termasuk didalamnya menjauhi sikap golongan putih dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan partai politik tidak terbatas dilaksanakan menjelang pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan melalui kampanye. Kegiatan pemberdayaan ini dapat dilakukan secara terprogram dan sudah diagendakan oleh masing-masing partai politik. Partai politik melalui kadernya memberikan penguatan dengan memberikan wawasan dan menanamkan nilai-nilai politik pada warga masyarakat. Kegiatan ini bisa dikemas dalam bentuk acara formal dan non- normal.

Dalam pelaksanaan pendidikan politik yang diutamakan tidak sekedar memberikan materi yang bersifat teoritis semata yakni sekedar mengenalkan nilai-nilai politik kepada warga masyarakat, namun yang terpenting adalah bagaimana kader-kader partai yang menjadi nara sumber itu dapat menunjukkan dan merealisasikan nilai-nilai politik tersebut dalam kehidupan riil, yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan begitu masyarakat tidak cepat jenuh hanya sekedar mendengarkan ceramah-

seramah dan mendengarkan ajaran-ajaran politik saja, melainkan mereka secara emosional perlu terlibat dan dilibatkan secara langsung dalam aksi nyata yang positif yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan masyarakat.

Pentingnya Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

Keberadaan pemilihan umum dalam negara demokrasi merupakan suatu keharusan, mengingat pemilihan umum merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat pemegang kedaulatan tertinggi sehingga rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih dan menentukan wakil-wakilnya melalui pemilihan umum. Melalui perhelatan akbar pesta demokrasi yang dinamakan pemilihan umum warga masyarakat bebas menyalurkan aspirasi yang dimilikinya. Melalui pemilihan umum warga masyarakat dapat menentukan wakil-wakilnya yang dipandang mampu membawa dan mengemban aspirasinya. Dengan keterlibatan warga masyarakat secara aktif dalam pemilihan umum menunjukkan begitu tingginya partisipasi warga masyarakat dalam memberi dukungan terhadap keberadaan sistem politik yang selama ini berjalan. Dengan demikian, dinegara demokrasi hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana tetap meningkatkan kesadaran partisipasi warga masyarakat dibidang politik

terutama dalam menyalurkan aspirasinya lewat pemilihan umum.

Budiardjo (2008:367) memberi makna partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Lebih lanjut dijelaskan, kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat cukup beragam salah satunya adalah timbulnya kesadaran warga negara baik secara individu atau kelompok memberikan aspirasi suaranya dalam pemilihan umum.

Karakteristik partisipasi politik masyarakat adalah tumbuhnya kesadaran dari dalam diri masyarakat sendiri. Dalam hal ini tidak ada unsur tekanan atau paksaan, bahkan ajakan dari pihak luar yang mendorong warga masyarakat untuk berbuat. Semua aktivitas politik yang dilakukan warga masyarakat betul-betul berasal dari dalam diri masyarakat sendiri. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk kesadaran warga masyarakat dan pencerminan jaminan atas hak asasi manusia dibidang politik.

Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dibidang politik khususnya dalam menyalurkan aspirasinya dengan memberikan

suara pada pemilihan umum merupakan indikator bahwa pelaksanaan demokrasi benar-benar menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Setiap warga negara yang usianya secara hukum dipandang memenuhi syarat diberi kesempatan untuk didaftar sebagai pemilih tetap dalam pemilihan umum. Disamping itu warga masyarakat juga mendapatkan jaminan kepastian hukum untuk bebas dalam menentukan aspirasinya tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun dalam menentukan pilihannya saat berlangsung pemilihan umum.

Pemilihan umum harus benar-benar dijaga kredibilitasnya, mulai dari proses persiapan sampai pelaksanaannya. Pemilihan umum jangan dianggap sebagai acara seremonial belaka. Pemilihan umum merupakan aktivitas politik yang terprogram yang diselenggarakan pemerintah untuk menentukan nasib bangsa periode kepemimpinan berikutnya. Melalui pemilihan umum, masyarakat berpartisipasi secara politik memilih calon-calon pemimpin yang diberi amanah untuk melanjutkan kepemimpinan berikutnya. Oleh karena itu, supaya partisipasi politik masyarakat tetap tinggi, perlu diimbangi dengan sikap dan prilaku dari pimpinan yang telah dipercaya dan diberi amanah melalui pemilihan umum untuk merealisasikan program-programnya yang telah disampaikan sewaktu kampanye menjelang pemilihan umum. Dalam hal ini jangan sampai

kepercayaan dari masyarakat yang sudah terbangun dinodai dengan sikap dan perilaku pimpinan yang kurang terpuji sehingga menimbulkan sikap apatis warga masyarakat dikemudian hari. Apabila kondisi demikian terjadi maka pertanda bahwa warga masyarakat kurang menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Dalam hal ini Budiardjo (2008:369) mengemukakan, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lebih lanjut dikemukakan, pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

GOLPUT : Sebagai fenomena politik yang Mengancam Kualitas Demokrasi

Salah satu fenomena yang keberadaannya terus ada dan selalu mendapat perhatian bahkan diminimalisir adanya setiap menjelang pemilihan umum adalah tumbuhnya perilaku golongan putih atau lazim dikenal dengan istilah golput. Perilaku golput sebenarnya tidak hanya ditujukan oleh masyarakat yang berpendidikan rendah melainkan juga dilakukan golongan terpelajar, tidak hanya dikalangan masyarakat pedesaan melainkan juga dikota-kota besar. Angka golput dalam setiap pelaksanaan pemilihan legislatif cenderung mengalami peningkatan.

Dalam pileg 1999 angka golput mencapai 6,4%, pileg 2004 meningkat menjadi 15,9% dan pileg 2009 mencapai angka 29,1%.

Golput pada dasarnya merupakan pertemuan solidaritas yang memiliki tujuan dan orientasi yang sama yaitu tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum. Dalam hal ini Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yaitu mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran dan lain-lain) berhalangan hadir ketempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan fundamental agama atau alasan politik-ideologi lain (dalam Hery M.N. Fatah).

Sedangkan menurut Novel Ali (1999:22) di Indonesia terdapat dua kelompok golongan putih. Pertama, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan

politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. Kedua, adalah golput pilihan. Yaitu mereka yang bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menghendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak Cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tetapi juga pada tingkat evaluasi.

Perilaku golput sebenarnya kurang bagus di negara demokrasi, meskipun sikap tersebut adalah hak setiap warga negara. Dikatakan tidak bagus karena kalau kondisi tersebut terus dibiarkan dan jumlahnya semakin meningkat akan menjadi ancaman tersendiri bagi kredibilitas pemerintahan. Kuat tidaknya suatu pemerintahan tergantung pada tinggi rendahnya dukungan dari masyarakat. Suatu pemerintahan yang tidak mendapat dukungan dari masyarakat, cepat atau lambat akan hancur dan tentunya akan berdampak pada rentannya tingkat stabilitas nasional suatu negara. Disamping itu, perilaku golput juga dapat menghambat perkembangan demokrasi di suatu negara. Tumbuh dan berkembangnya demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia

diperlukan masyarakat yang sadar politik, yang memiliki kesadaran dalam membangun kehidupan berdemokrasi. Membangun kehidupan berdemokrasi tercermin dari respon positif partisipasi politik masyarakat dan kualitas dari sikap dan perilaku politik masyarakat dalam setiap menyikapi persoalan politik termasuk penyaluran aspirasinya melalui pemilihan umum.

Perilaku golput dapat mengancam keberadaan demokrasi. Di negara demokrasi setiap warga negara diberi kebebasan menyalurkan aspirasinya melalui lembaga yang ada. Dukungan rakyat sangat berarti karena akan menentukan berjalan tidaknya mekanisme pemerintahan. Sebaliknya, melemahnya dukungan masyarakat terhadap pemerintahan akan berakibat fatal bagi keberlangsungan pemerintahan demokrasi yang memiliki karakteristik pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara demokrasi pemerintahannya sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Jangan sampai dukungan malah menurun sehingga melahirkan pemerintahan yang rapuh.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik warga negara dalam negara demokrasi dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas politik. Berkenaan beragamnya bentuk dan tingkatan partisipasi politik, Gabriel A. Almond (dalam Mas'ood dan

MacAndrews,1993:47, dikutip Sahid Gatara:2009:317) telah membedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk aksi yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik nonkonvensional. Adapun partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam

demokrasi modern. Sementara bentuk nonkonvensional adalah kegiatan ilegal dan bahkan penuh kekerasan (violence) dan revolusioner. Adapun bentuk-bentuknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Konvensional	Non-Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian suara • Diskusi politik • Kegiatan kampanye • Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan • Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Berdemonstrasi/unjuk rasa • Konfrontasi • Mogok • Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran) • Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) • Perang gerilya.

Sementara itu, Susilo, Basrowi, Sukidi (2003:78-79) juga mengklasifikasikan bentuk partisipasi politik masyarakat menjadi dua yaitu partisipasi

konvensional dan nonkonvensional. Perbedaan kedua bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Partisipasi Konvensional	Partisipasi nonkonvensional
Pemberian suara, mengajukan pendapat, memilihn wakil rakyat, mengajukan dan menolak calon pemimpin, mencoblos bumbung kosong.	Mengajukan petisi
Diskusi politik, rapat umum, debat politik, sarasehan politik, orasi politik secara ilmiah, kampanye.	Unjuk rasa (demonstrasi) tanpa dan dengan kekerasan, unjuk kekuatan massa
Kegiatan kampanye di media cetak, televisi, kampus, lapangan, jalan-jalan.	Konfrontasi, mogok makan, mogok kerja, memboikot.
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, menduduki jabatan politik, mencari jabatan politik.	Tindak kekerasan politik, membuat huru hara, perusakan, pemboman, pembakaran bendera, pembakaran

Partisipasi Konvensional	Partisipasi nonkonvensional
	patung, menguasai bangunan umum, menyegel kantor, menawan pejabat publik, memaksa pejabat politik atau publik membacakan tuntutan, mengusung tandu, memberi kado ayam betina atau celana cdalam.
Komunikasi individual dengan para pejabat politik dan administrasi, menulis surat ke kotak pos yang disediakan negara.	Penculikan, pembunuhan, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, kudeta, revolusi, perang gerilya, pengrusakan, pemboman, bom bunuh diri.

KESIMPULAN

Setiap menjelang diselenggarakan pesta demokrasi yakni pemilihan umum, fenomena golongan putih selalu mendapat perhatian. Golongan putih pada dasarnya bentuk kekecewaan masyarakat atas penyelenggaraan pemilu yang diwujudkan dalam perilaku politik warga masyarakat dengan tidak memberikan suara saat pelaksanaan pemilihan umum. Sikap dan perilaku politik golongan putih kini sudah mulai menjadi tend, dimana jumlahnya menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Bila kondisi demikian dibiarkan kualitas demokrasi menjadi rendah.

Apabila perhatian masyarakat dalam pemilihan umum di negara demokrasi sangat rendah ini merupakan indikator menurunnya pembangunan politik. Gagalnya pembangunan politik akan berdampak pada stabilitas politik suatu negara, mengingat bila sistem politik tidak mendapat dukungan dan tidak mendapat kepercayaan dari rakyat cepat atau lambat akan jatuh.

Sehubungan hal tersebut, peran partai politik cukup strategis dalam mendewasakan politik warga masyarakat melalui pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Novel, 1999, Peradapan Komunikasi Politik, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Budiardjo Meriam, Prof. 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia

Eep Saifulloh Fatah dan Hery M.N. Fattah, Fenomena Golput dan Krisis Kepercayaan, <http://lampunggpost.com>

Gatara Sahid A.A. Fh.M.Si, 2009, Ilmu POLitik Memahami dan Menerapkan, Bandung, Pustaka Setia

Harun Rochajat, Ir., Med., PhD. Dan Sumarno AP., Drs., S.H., 2006, *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*, Bandung, Mandar Maju.

Subiakto Henry dan Ida Rachmah, 2012, *Komunikasi Politik*,

- Media, dan Demokrasi*,
Jakarta, Kencana Prenada
Media Group
- Susilo Suko, Basrowi, Sukidin,
2003, Sosiologi
Politik, Surabaya,
Yayasan kampusiana
Surabaya
- Zuhro R. Siti, Dkk, 2009, *Demokrasi
Lokal, Perubahan dan
Kestinambungan Nilai-
Nilai Budaya Politik
Lokal di Jawa Timur,
Sumatera Barat,
Sulawesi Selatan dan
Bali*, Jogjakarta,
Penerbit Ombak